# Peduli ODGJ, Pj. Wali Kota Bekasi Beri Bantuan Sembako dan Pemeriksaan dan OBat-Obatan Gratis

Category: News Juli 21, 2024



Peduli ODGJ, Pj. Wali Kota Bekasi Beri Bantuan Sembako dan Pemeriksaan dan OBat-Obatan Gratis

**KOTA BEKASI, Prolite** — Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk memberikan fokus dan perhatian lebih kepada Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) agar mendapatkan bantuan rehabilitasi serta pengobatan hingga dinyatakan sembuh dengan gratis.

Dinas Kesehatan Kota Bekasi bersama unsur-unsur terkait berperan dalam memfasilitasi segala program rehabilitasi dan pengobatan gratis untuk para ODGJ yang bernaung di beberapa Yayasan atau Panti Rehabilitasi di Kota Bekasi salah satunya Yayasan Galuh yang berlokasi diKelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu.



#### Dok Pemkot Bekasi

Di hari Rabu (17/07), Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad berkesempatan mengunjungi Yayasan Galuh untuk menemui para ODGJ yang berjumlah sekitar 300 orang dalam rangka memberikan bantuan sembako serta menyaksikan pemeriksaan berkala dari Tenaga Medis professional serta pemberian obat gratis sebagai salah satu ikhtiar pengobatan untuk mereka.



#### Dok Pemkot Bekasi

Dalam sambutannya, Gani Muhamad menyampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan wujud sinergitas dan kolaborasi Pemerintah Kota Bekasi dengan berbagai unsur masyarakat yang peduli dengan kesembuhan para ODGJ.

"Sudah tugas kami Pemerintah, untuk men-\_support\_ berbagai yayasan atau panti rehabilitasi yang bersungguh-sungguh dan sangat peduli dalam memberikan pembinaan serta pendampingan kepada para ODGJ. Hal ini memiliki makna tersendiri dan merupakan wujud nyata bahwa kita tidak membeda-bedakan manusia dan sangat diperlukan keikhlasan dan ketulusan bagi para pembina untuk terus mengabdi," ujar Gani Muhamad.

Gani Muhamad tentunya mendukung penuh segala bentuk pembinaan dan pendampingan dari yayasan atau panti rehabilitasi yang ada di Kota Bekasi kepada para ODGJ dan Ia pun berterima kasih serta salut atas segala bentuk pengabdiannya.

"Hari ini saya menyaksikan langsung semangat para ODGJ untuk sembuh dan bahkan sudah ada bukti nyata yang berhasil survive menghadapi segala proses pengobatan sampai dengan dinyatakan sembuh dan bahkan kini sudah menemukan jodohnya. Sebuah berkah yang luar biasa. Hal tersebut tidak terlepas dari pengabdian para pembina atau pendamping yang dengan tulus ikhlas mengurus serta memberikan perhatian. Saya sampaikan dan ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Tetap semangat dan semoga berkah selalu," tutup Gani Muhamad.

wan

Festival Adu Bedug dan Dondang Berjalan Meriah. Pj. WaliKota Bekasi: 'Jadikan Ajang Silaturahmi Antar Sesama'

Category: Daerah Juli 21, 2024



Festival Adu Bedug dan Dondang Berjalan Meriah. Pj. WaliKota Bekasi: 'Jadikan Ajang Silaturahmi Antar Sesama'

KOTA BEKASI, Prolite — Guna melestarikan Kebudayaan Betawi yang ada di Kota Bekasi, Kecamatan Mustikajaya menggelar Festival Adu Bedug dan Dondang Pada hari Sabtu (18/05) yang terpusat di Stadion H. Natrom Nursyamsu Kecamatan Mustikajaya.

Tradisi Adu Bedug berawal dari mencari hiburan dengan mengarak bedug keliling dari kampung ke kampung pasca Idul Fitri.

★
dok DPRD Kota Bekasi

★
dok DPRD Kota Bekasi

★ dok DPRD Kota Bekasi

#### dok DPRD Kota Bekasi

Tradisi Adu Bedug selain menjadi hiburan, juga menjadi ajang bersilaturahmi sesama warga sekitar. Sedangkan, arak dondang merupakan tradisi asli warga Betawi Bekasi yang biasa dilakukan ketika upacara pernikahan.

Dondang sendiri merupakan salah satu bawaan pengantin lakilaki untuk diserahkan ke pengantin perempuan, pada saat pengantin perempuan mengadakan hajatan.

Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad hadir menyaksikan secara langsung kemeriahan Festival Adu Bedug dan Dondang Mustikajaya yang sudah berlangsung ke-17 kalinya. Menurutnya ada 3 hal penting dari gelaran ini yang bisa diilhami oleh semua masyarakat.

'Setelah saya mengikuti jalannya festival, ada 3 filosofis yang bisa saya simpulkan, yakni pertama gelaran ini merupakan ajang yang dapat mempererat silaturahmi antar warga, kedua gelaran ini merupakan acara tahunan dan sudah turun temurun dilaksanakan, sehingga terjaganya warisan budaya Betawi di Kota Bekasi, dan ketiga mampu meningkatkan perekonomian penggiat UMKM, karena disediakannya booth-booth bazaar, sehingga mereka bisa menjajakan produk-produk unggulannya', ungkap Gani Muhamad.

Gani Muhamad juga sangat mengapresiasi hadirnya Festival Adu Bedug dan Dondang Mustikajaya. Menurutnya, "'Festival ini bisa kita ajukan ke Tingkat Nasional sebagai Budaya Tak Benda, dan semoga cita-cita besar ini bisa terwujud jika semua unsur konsisten menjalankannya dan terus dikembangkan pelaksanaannya, karena acara ini mengandung nilai kebudayaan yang kental dan harus dilestarikan' pungkas Gani Muhamad.

# Mei Mulai Diterapkan Braga Free Vehicle , Pj Wali Kota Bandung Minta Dukungan Masyarakat

Category: News Juli 21, 2024



Mei Mulai Diterapkan Braga Free Vehicle , Pj Wali Kota Bandung Minta Dukungan Masyarakat

**BANDUNG, Prolite** — Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono meminta dukungan masyarakat terkait penerapan Braga Free Vehicle (BFH) atau Braga bebas kendaraan mulai Mei mendatang pada hari Sabtu dan Minggu selama 24 jam.

"Salah satu icon Kota Bandung adalah Braga. Jalan Braga ingin kita kembalikan lagi kepada fungsi awal. Insyaallah minggu depan (penerapannya). Mohon dukungan dari semuanya," kata Bambang di Balai Kota Bandung, Jumat 26 April 2024.

Meskipun masih tahapan perencanaan, Bambang berharap pelaksaan Braga Free Vehicle atau Braga tanpa kendaraan ini mampu berjalan optimal.

"Di akhir pekan saja, mulai Mei pada Sabtu dan Minggu. Tolong media juga mengedukasi dan mempublikasikan secara proporsional kepada publik, bahwa ini bukan keinginan pemerintah kota tetapi keinginan semua," ungkapnya.

Kota Bandung sebagai kota jasa dan pariwisata, Bambang berharap, BFH mampu menarik wisatawan ke Kota Bandung.

"Harapannya simpel saja, Kota Bandung ini kota jasa dan pariwisata. Apa sih yang mau dijual? Salah satu di antaranya untuk bisa menarik wisatawan dan juga untuk warga Kota Bandung. Semua bisa menikmati Jalan Braga yang akan kita uji cobakan di Jalan Braga panjang," ungkapnya.

Menurutnya, penerapan tersebut telah melewati kajian yang komperhensif.

"Tentunya ini komprehensif, sudah kita perhitungkan. Termasuk kita persiapkan kantong-kantong parkir dan lainnya. Makanya tolong edukasi kepada publik secara proporsional, bahwa ini adalah keinginan semua," ujarnya. (yan)\*\*

# Rapat Paripurna HUT Kota Bekasi ke 27, Komisi 1 Sebut Pj Wali Kota Tak Libatkan DPRD Kota Bekasi

Category: Daerah Juli 21, 2024



Rapat Paripurna HUT Kota Bekasi ke 27, Komisi 1 Sebut Pj Wali Kota Tak Libatkan DPRD Kota Bekasi

**Prolite** — Rapat paripurna HUT Kota Bekasi diduga tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bekasi dalam jalannya pemerintahan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I, Wakil Ketua, Sekretaris hingga Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi.

Awalnya, ketika rapat paripurna berlangsung mereka melakukan interupsi kepada pimpinan DPRD Kota Bekasi.

Dalam intrupsi itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rahmat Faisal menilai Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad sulit berkomunikasi sebagai rekan mitra kerja.

"Menyambung dengan apa yang disampaikan (oleh sekretaris komisi), mungkin bapak masih ingat saya WA bapak, titik pun bapak tidak balas," kata Rahmat Faisal saat Rapat Paripurna HUT Kota Bekasi, Minggu, 10 Maret 2024.

Dia merasa Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad berjalan sendiri dan tidak melibatkan anggota dewan sebagai perwakilan masyarakat.

"Sumpah kami untuk menjaga amanat masyarakat, jadi kalau Bapak merasa jalan sendiri mungkin hak angket kami juga bisa berjalan sendirian," demikian kata dia.

Dalam rapat paripurna HUT Kota Bekasi, anggota DPRD mengungkapkan tentang banyak kebijakan Pemkot Bekasi yang dianggap membuat gaduh.

Salah satu kebijakan yang dianggap membuat gaduh tersebut adalah diperbolehkannya tempat hiburan malam beroperasi selama bulan Ramadan.

"Saudara Pj Wali Kota yang saya hormati, terimakasih kehadiran bapak sangat kami butuhkan, baik di kami dan di seluruh Kota pertama pak Pj, kami ini sudah berapa kali punya Pj. Mudahmudahan bapak menjadi yang pertama dan terakhir disini, Karena kenapa? Saya sangat banyak mendengar aspirasi dari warga ataupun dari semua instrumen pemerintahan," ucap Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI-Perjuangan Nuryadi Darmawan saat menyampaikan interupsi di Sidang Paripurna, Minggu, 10 Maret 2024.

Nuryadi menyatakan, sebelum msalah HUT Kota Bekasi ada juga

terjadi kegaduhan terkait dengan kaos Jersey.

Kemudian juga dengan konsep pemilu yang sekarang ini dalam tanda kutip tidak maksimal.

"Kemudian kita ricuh dan gaduh lagi terkait dengan hari ini adalah THM (Soal Isu Maklumat Operasional THM yang buka di Bulan Ramadhan), baru beberapa hari lagi baik terkait di stakeholder masyarakat LSM dan lainnya menjadi tempat keluhan di para Komisi 1," jelas dia.

Pihaknya menjawab, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi melalui forum terhormat ini harus menyampaikan beberapa aspirasi yang hendak dikemukakan

"Dalam forum yang terhormat ini, alangkah indahnya pak saudara Pj Wali Kota Bekasi andai kata tidak lah harus kami berteriak-teriak, tetapi bapak peduli dengan mendengarkan aspirasi kita sebagai aspirasi warga Kota Bekasi. Jadi jangan tunggu kami berkumpul dulu," sambung dia.

Terlebih, kata dia belum lagi hilir mudik semua isu yang bukan lagi menjadi sebuah isu. Karena, selepas Komisi 1 teliti dan tele

Belum lagi terkait suasana kepempimpinan yang tidak nyaman di pejabat pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Saya harap Pak Pj di Ulang Tahun Kota Bekasi ini berikanlah kenyamanan buat warga Kota Bekasi," imbuhnya

"Kedua berikan lah juga apresiasi bukan sebuah sanksi terhadap siapapun OPD yang sudah merestorasi OPD nya dengan baik, tidak meluarkan isu isu terkait dengan rotasi mutasi yang saya pikir mereka nantinya bisa menjadi suasana yang keganggu dalam menjalankan pekerjaannya," tambahnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyikapi santai saat Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad dikritik oleh legislator pada saat pelaksanaan Rapat Paripurna HUT Kota Bekasi ke 27 Tahun.

Sebab, melalui Rapat tersebut Gani Muhamad mendapatkan kritik evaluasi kinerja yang disampaikan maupun sulit berkomunikasi Komisi 1 DPRD Kota Bekasi dengan pimpinan daerah tertinggi di Kota Bekasi

"Ya itu kan dinamika, gak apa-apa," ucap dia singkat kepada awak media selepas pelaksanaan Rapat di Gedung DPRD Kota Bekasi, Minggu, 10 Maret 2024.

Bey Machmudin mengungkapkan bahwa pihaknya menerima dengan santai atas kritik yang disampaikan oleh para anggota DPRD kepada kinerja anak buahnya yang telah memimpin Kota Bekasi selama beberapa waktu.

"Enggak masalah itu kan memang tugas dewan untuk melakukan cek and balancesis," pungkas dia.

Sementara, Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad mengetahui kritik dari para Anggota DPRD. Hal itu sebagai bentuk evaluasi kinerja dari dirinya yang telah menjadi sorotan

"Saya pikir kritik itu bentuk atensi perhatian, kita tidak boleh anti kritik, kita tidak boleh menutup diri ini dan itu juga dalam rangka tugasnya dewan. Kita harus apresiasi itu," ungkapnya

Terlebih, kata dia dari beberapa kritik yang dikemukakan juga menjadi tolak ukur bagi dirinya agar semakin baik, dalam memimpin Kota Patriot.

"Oh iya saya, jangankan aparatur, saya sebagai Pj pun dievaluasi tiap tiga bulan. Ini untuk apa? Yaitu semata mata untuk Kota Bekasi yang terbaik," pungkas dia.

# Kesalahan Input Data Suara Capres: KPU Minta Maaf dan Siap Melakukan Koreksi

Category: Politik & Parlemen

Juli 21, 2024



**Prolite** - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia secara resmi meminta maaf kepada publik mengenai temuan kesalahan dalam penginputan data formulir C hasil perolehan suara Pemilu.

KPU menemukan bahwa sebanyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah melakukan kesalahan dalam menginput data formulir C hasil perolehan suara ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Hasyim Asy'ari, sebagai Ketua KPU, mengungkapkan permohonan maaf atas kesalahan tersebut dan menegaskan komitmen KPU untuk melakukan koreksi segera.

Hal ini diungkapkan oleh Hasyim pada hari Kamis, tanggal 15 Februari, sebagai langkah tanggung jawab dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum.

×

Ketua KPU Hasyim Asy'ari — Media Indonesia

Hasyim menegaskan bahwa KPU tidak memiliki niat ataupun tindakan untuk memanipulasi hasil penghitungan suara, terutama ketika terjadi kesalahan konversi angka dari Formulir C ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

"Tidak ada niat dan tindakan KPU beserta jajaran penyelenggara pemilu untuk melakukan manipulasi hasil perolehan suara per-Tempat Pemungutan Suara (TPS) melalui unggahan Formulir C hasil TPS dalam Sirekap," jelas Hasyim, menekankan bahwa kesalahan tersebut murni bersifat teknis dan bukan disengaja.

Hasyim mengungkapkan bahwa kesalahan konversi data hanya mencapai 0,64 persen dari total Formulir C yang sudah diunggah dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

×

Aplikasi Sirekap Pemilu — ist

KPU mencatat bahwa jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah mengunggah Formulir C ke dalam Sirekap sebanyak , dan hanya di antaranya yang mengalami kesalahan konversi.

Hasyim menjelaskan, "Jumlah TPS yang mengalami kesalahan konversi adalah dari total , atau setara dengan 0,64 persen."

Dia juga menambahkan, "Patut disyukuri bahwa ada Sirekap yang memungkinkan unggahan data tersebut, sehingga hasil penghitungan di setiap TPS dapat diketahui oleh publik. Dengan begitu, tidak ada yang disembunyikan atau disimpan secara diam-diam, tetapi segala sesuatunya dipublikasikan secara

transparan."

Hasyim menjelaskan bahwa sistem yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum RI memantau dengan cermat setiap unggahan formulir C dan konversinya.

×

Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Inodnesia — lensakini

"Kami di KPU pusat, melalui sistem yang ada, dapat memantau dengan jelas mana saja unggahan formulir C yang mengalami kesalahan konversi," ujarnya.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum RI juga telah melakukan pemantauan terhadap kemungkinan kesalahan dalam proses perhitungan suara.

Sebagai tanggapan, langkah koreksi akan segera dilakukan untuk memperbaiki kesalahan konversi yang terjadi.

"Oleh karena itu, kami sebenarnya mengetahui dan tentu saja kami akan segera melakukan koreksi terkait kesalahan konversi formulir ke angka-angka perhitungan sesegera mungkin," pungkasnya

# Evaluasi SPBE 2023 : Menembus Batas Integrasi Layanan untuk Rakyat

Category: News, Pemerintahan

Juli 21, 2024



**Prolite** - Dilansir dari , SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dinilai sebagai upaya memberantas korupsi, meningkatkan transparansi, bahkan meningkatkan performa di mata investor.

# SPBE Nasional Terus Menunjukkan Trend Positif

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas menekankan bahwa digitalisasi birokrasi dan administrasi pemerintahan bukan hanya tentang jumlah aplikasi, melainkan integrasi layanan untuk kepentingan rakyat.

Dalam sebuah diskusi dengan Pemerintah Provinsi Riau pada 7 September 2023, Menteri Anas mengungkapkan, banyak aplikasi layanan pemerintahan yang tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Oleh karena itu, integrasi atau interoperabilitas antar layanan menjadi sangat penting.

Interoperabilitas, dalam konteks ini, berarti kemampuan antarsistem elektronik untuk berkoordinasi dan kolaborasi

dalam pertukaran data dan informasi. Hal ini menjadi fokus dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Menteri Anas yakin, dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang baik, masyarakat akan mendapatkan akses layanan publik yang lebih mudah dan efisien.



### siapspbe

Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan pada 2024 Indeks SPBE Nasional berada pada kategori baik.

Interoperabilitas memang memiliki peran krusial, bertujuan untuk memangkas rantai birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada rakyat.

Tantangannya, termasuk masalah keamanan data, infrastruktur teknologi, serta edukasi masyarakat dalam teknologi.

Selama ini, berbagai unsur telah dikembangkan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia, meliputi E-Government, E-Procurement, E-Taxation, E-Health, E-Education, dan E-Planning.

Tahap evaluasi sedang dilaksanakan. Kementerian PAN RB berkoordinasi dengan 574 instansi pemerintah untuk penilaian SPBE dari tanggal 11 hingga 29 September 2023. Evaluasi ini melibatkan 30 perguruan tinggi dan berbagai instansi pemerintah lainnya.

Aspek yang dinilai dalam evaluasi SPBE 2023 mencakup 47 indikator yang melibatkan kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan.

Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana implementasi SPBE di pusat dan daerah, dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk indeks peringkat.

Sebelumnya, 16 instansi pemerintah berhasil meraih predikat 'sangat baik' dalam evaluasi SPBE 2022. Meskipun begitu, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik nasional 2022 hanya mencapai angka 2,34 (kategori "cukup"), naik 0,1 dari tahun sebelumnya.

Pada kancah internasional, implementasinya di Indonesia mendapat perhatian. Dalam survei e-Government oleh PBB pada 2022, Indonesia menempati peringkat 77 dari 193 negara, meningkat 11 peringkat dari 2020.



\_

Berbagai manfaat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah diakui, termasuk efisiensi pengelolaan keuangan, transparansi, pengendalian pengeluaran, dan pengurangan potensi kecurangan.

SPBE dapat mengotomatisasi proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membantu pengendalian pengeluaran dan pengurangan risiko kecurangan.

Kini, dengan evaluasi 2023 sedang berlangsung, ekspektasi masyarakat semakin tinggi untuk melihat implementasi SPBE yang lebih baik dan efisien demi kepentingan bangsa dan negara.

## Diplomasi Kuat : Dubes

# Malaysia dan Wagub Sumut Prioritaskan Kerjasama Bilateral

Category: News, Pemerintahan

Juli 21, 2024



**Prolite** — Kunjungan Dubes Malaysia untuk Indonesia ke Rumah Dinas Jabatan Wagub Sumut, pada tanggal 24 Agustus 2023, menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara dua negara serumpun ini.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempererat kerja sama yang sudah terjalin antara Indonesia dan Malaysia serta menjaga silaturahmi di antara keduanya.

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut), Musa Rajekshah, dan Duta Besar Malaysia, Dato' Syed Mohamad Hasrin bin Tengku Hussin bersepakat bahwa kerja sama yang telah ada perlu ditingkatkan lebih lanjut demi kepentingan bersama.

## Dubes Malaysia dan Wagub Sumut Perkuat Hubungan Bilateral Antara Kedua Negara

×

Pertemuan Antara Dubes Malaysia dan Wagub di Rumah Dinas Jabatan Wagub Sumut — Cr. sumutprov

Musa Rajekshah, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya telah mengkomunikasikan beberapa peluang investasi yang ada di Sumatera Utara kepada Pemerintah Malaysia dan pengusaha dari Malaysia.

Ia berharap kerjasama ini akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi baik di Indonesia maupun di Malaysia.

Hal ini mencerminkan upaya untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara melalui kolaborasi ekonomi yang saling menguntungkan.

Ijeck menyampaikan bahwa hubungan bilateral antara Malaysia dan Sumatera Utara telah terjalin baik dalam berbagai sektor seperti pariwisata, kesehatan, pendidikan, dan pertanian.

Terlebih lagi, sebelah utara batas daratan Pulau Sumatera adalah Malaysia dan Singapura.

## Memperkuat Hubungan Dalam Sektor Pariwisata dan Sektor Pendidikan



Pertemuan Antara Dubes Malaysia dan Wagub di Rumah Dinas Jabatan Wagub Sumut — Cr. sumutprov

"Dalam sektor pariwisata, kami memiliki banyak destinasi wisata, terutama dengan pengembangan potensi Danau Toba yang telah dijadikan Destinasi Pariwisata Super Prioritas oleh Pemerintah Sumatera Utara dan pemerintah pusat. Kami berharap kunjungan wisatawan dari Malaysia juga dapat meningkat," ujar Musa Rajekshah.

Selain pariwisata, kerja sama di bidang pendidikan juga terus berlanjut. "Kami berencana untuk meningkatkannya lagi. Ini adalah hal yang positif karena kami menyadari bahwa Sumatera Utara memiliki letak geografis yang lebih dekat dengan Malaysia, baik dari segi dataran maupun perairan," tutup Wagub Sumut.

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato' Syed Mohamad Hasrin bin Tengku Hussin, menyampaikan harapan yang sejalan.

Ia berharap bahwa hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia, khususnya dengan Sumatera Utara, dapat terus ditingkatkan, terutama dalam sektor pariwisata dan pendidikan.

"Kami berharap hubungan ini dapat lebih diperkuat, terutama di bidang yang memiliki potensi besar untuk pengembangan, seperti kerja sama di bidang pendidikan. Ini tidak hanya melibatkan pertukaran pelajar, tetapi juga dalam hal riset, pertukaran dosen, dan lain sebagainya," ujarnya.

Musa Rajekshah menjelaskan bahwa hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Bukti dari hal ini adalah pertemuan antara para pimpinan dari kedua negara.

Hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia telah berlangsung selama waktu yang lama dan ditandai oleh berbagai kunjungan tingkat tinggi antara kedua negara.

×

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara — Cr. Antara Foto

Pada tahun ini, terjadi serangkaian kunjungan antara pemimpin Malaysia dan Indonesia yang menunjukkan kepentingan kuat dalam mempererat hubungan bilateral.

Salah satu contoh dari kunjungan tersebut adalah kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Jakarta dan Labuan Bajo. Kunjungan tersebut menunjukkan komitmen dari kedua negara untuk memperdalam kerja sama dan hubungan diplomatik di berbagai bidang.

Dubes Malaysia menambahkan bahwa Sumatera Utara memiliki peran penting dalam perdagangan antara Malaysia dan Indonesia.

Provinsi ini menjadi yang terbesar keempat di Indonesia dalam hal perdagangan dengan Malaysia. Dubes Malaysia juga menekankan upaya untuk meningkatkan volume perdagangan di masa depan.

Selain Dubes Malaysia, turut hadir dalam pertemuan tersebut Konjen Malaysia di Medan Aiyub Omar, serta beberapa perwakilan lain dari Kedutaan Besar Malaysia, termasuk Menteri Perwakilan, Menteri Penasehat, dan Atase Petahanan.

Kesemua pihak hadir untuk membahas dan memperkuat kerja sama antara Sumatera Utara dan Malaysia dalam berbagai bidang.

# Roadshow KPK, Kali Ini Kunjungi ASN dan Dewan

Category: Daerah Juli 21, 2024



## Roadshow KPK, Kali Ini Kunjungi Anggota Dewan

BANDUNG, Prolite — KPK kembali melakukan sosialisasi. Roadshow KPK kali ini sosialisasi anti korupsi diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota DPRD dan pasangan (suami atau istrinya).

Salah satu istri anggota Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya mengaku jadi tahu segala bentuk korupsi berkat Roadshow KPK ini.

"Kalau menurut saya memberi dengan ikhlas tidak masalah asal tidak ada syarat. Tapi kalau menurut aturan tadi dari KPK itu tidak boleh kan," ujar Rinne Andriana Senjaya di ruang kerja suaminya, Jumat (7/7/2023).

Masih kata Ine, suaminya selain sebagai anggota dewan juga suka ceramah. Dan selama ceramah diakuinya tidak mau menerima uang.

"Kalau uang tidak mau, tapi kalau berbentuk makanan diterima. Saya sendiri selalu mengingatkan kepada bapak (Edwin Senjaya) jangan berlebihan, selama ini kami tidak pernah jalan-jalan ke luar negeri, kecuali saya diajak bapak. Ke anak-anak juga saya mengajarkan barang itu kalau dipakai baru beli kalau tidak

dipakai tidak usah," jelasnya.

Lain lagi dengan Desi Kurnia Sari mengatakan, sosialisasi seperti *Roadshow* KPK ini memang perlu diketahui oleh para istri dan keluarga pemangku kebijakan.

"Apalagi istri anggota dewan ya. Meski kita tidak bersinggungan langsung dengan pejabat. Tapi mungkin kita bersinggungan langsung dengan orang yang datang konstituen. Sehingga memang perlu materi seperti ini dikomunikasikan lebih luas lagi," kata istri Andri Rusmana, anggota DPRD dari Fraksi PKS.

Menurutnya, korupsi bisa terjadi sejak dini jika anak-anak sudah terbiasa dengan hal itu, sehingga ketika sudah beranjak dewasa jadi dianggap wajar.

"Contoh kecilnya seperti menyontek, ambil uang kembalian, atau hal-hal yang dianggap biasa oleh orang tua mereka. Padahal, ketika mereka tumbuh menjadi seorang pejabat," tuturnya.

Hal-hal kecil yang tidak baik itu akan semakin berkembang juga dan membuat mereka berpikir jika korupsi sedikit tidak masalah, dapat gratifikasi sedikit pun bukan masalah.

"KPK bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan menyelipkan di soal-soal anak sekolah mulai dari dini mengenai perilaku korupsi. Saya pikir ini harus diketahui oleh masyarakat umum juga karena akan meregenerasi. Di sini aja terganti dengan anak-anak muda," usulnya.

Sebelumnya Jumat, 7 Juli 2023 pagi, kursi-ruang rapat paripurna DPRD Kota Bandung tampak penuh diisi oleh anggota dewan dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), mereka pun turut memboyong pasangan masing-masing.

Lebih dari 500 orang hadir secara *hybrid*, termasuk perangkat daerah di kecamatan dan kelurahan beserta pasangan masing-masing untuk mengikuti Sosialisasi Anti Korupsi dari Komisi

Pemberantas Korupsi (KPK).

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK Republik Indonesia, Wawan Wardiana mengaku, sengaja melibatkan pasangan dari seluruh pemangku kebijakan dalam sosialisasi *Roadshow* KPK kali ini.

"Saya berharap para istri tidak hanya sebagai 'menteri keuangan', tapi juga harus sebagai 'BPK/auditor'. Begitu dapat uang dari suami, tanya dulu itu uang apa. Jangan sampai mau menerima uang haram. Untuk menjaga apakah keluarga kita ini berintegritas (transparan dan akuntabel) atau tidak," ujar Wawan.

Sosialisasi ini merupakan rangkaian dari *Roadshow* KPK. Sebelumnya kegiatan serupa digelar secara terbuka di depan Gedung Sate bersama ratusan masyarakat Kota Bandung.

"Korupsi itu tidak hanya melibatkan teman se kantor, tapi juga keluarga. Pada kesempatan kali ini KPK ingin mengingatkan, ke depan kita jaga Kota Bandung ini pejabatnya amanah. Kita cegah tindakan korupsi melalui peran keluarga," jelasnya.

Ia mengatakan, saat ini kasus korupsi yang paling sering ditemukan adalah gratifikasi dan suap. Selain itu ada pula tindak pemerasan.

"Oleh karena itu, tadi saya juga menjelaskan perbedaan dari gratifikasi, suap, dan pemerasan. Agar keluarga pun tahu dan bisa mencegah tindakan ini terjadi," ungkapnya.

Sebab menurutnya, untuk menerima hadiah, para pejabat harus hati-hati. Apalagi yang berkaitan dengan pekerjaan dan kewenangan yang sedang dijalankan.

"Itu sudah pasti harus ditolak. Tapi kalau ada hadiah di luar konteks pekerjaan kita, misal hadiah makanan dari saudara atau hadiah dalam bentuk lain, itu boleh diterima. Tapi tetap harus dilaporkan ke KPK," akunya di sela kegiatan *Roadshow* KPK.

Dalam pemaparannya, Wawan menjelaskan, korupsi terdiri dari tiga jenis yakni petty corruption, grand corruption, dan political corruption.

Petty corruption merupakan korupsi kecil-kecilan yang dilakukan masyarakat umum ke pemerintah kewilayahan untuk memperlancar urusan.

Sedangkan *grand corruption* merupakan penyalahgunaan kekuatan tingkat tinggi yang menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan banyak orang.

"Biasanya korupsi ini di atas Rp1 miliar. Biasanya pelakunya adalah penyelenggara negara, seperti presiden, wapres, wali kota dan wakil, bupati dan wakil, eselon 1, kepala lembaga. Ini yang ditangani langsung oleh KPK," ucapnya.

Sedangkan *political corruption* berupa manipulasi kebijakan oleh para pengambil keputusan politik yang menyalahgunakan posisinya untuk mempertahankan kekuasaan, status, dan kekayaannya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mengatakan, program *Roadshow* KPK Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi dari KPK merupakan upaya untuk selalu terus mengingatkan para pejabat agar berlaku jujur dan tidak korupsi.

"Saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran, apalagi menjelang tahun pemilu 2024. Di sini juga menghadirkan para istri anggota DPRD, camat, ketua OPD. Hal seperti ini pertama bagi kami," ungkap Tedy.

# Seminar Memperingati Hari Lahirnya Pancasila

Category: Daerah Juli 21, 2024



BANDUNG, Prolite — Sekretariat DPRD Jawa Barat menggelar seminar dalam rangka peringatan Hari Lahirnya Pancasila dengan tema Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global. Kegiatan seminar dilakukan di rooftop gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Rabu (14/6).

Seminar digelar dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni. Kegiatan diisi oleh berbagai narasumber diantaranya, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Dr. Bedi Budiman,., Kepala Dinas Pendidikan Jabar Drs. Wahyu Mijaya, dan Sosiolog Dr. Asep Salahudin.

Hadir pula dalam seminar Ketua DPRD Jawa Barat, . Ineu Purwadewi Sundari.,.,M.M. Dalam sambutannya, Ineu Purwadewi

Sundari mengapresiasi acara seminar dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Jawa Barat.

Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, seminar ini sangat penting untuk mengingatkan kembali terhadap sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Termasuk bagaimana Pancasila dicetuskan, hingga menjadi ideologi, dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

Diharapkan kegiatan ini bisa berkesinambungan, dan lebih banyak lagi peserta khususnya generasi muda yang hadir. Agar generasi muda bisa memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila.

"Sebagai pimpinan DPRD Jawa Barat. Saya mengapresiasi Sekretariat DPRD Jawa Barat, Komisi I karena sudah memfasilitasi kegiatan ini, dan berterima kasih kepada yang sudah hadir (termasuk narasumber). Saya berharap kegiatan ini terus dilakukan," kata Ineu Purwadewi Sundari, Bandung, Rabu (14/6/2023).

Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman. Menurutnya, — seminar terkait Pancasila sangat penting sebagai upaya mengingatkan kembali betapa pentingnya melestarikan nilai-nilai Pancasila. Mulai dari sejarahnya, posisi Pancasila dengan ideologi negara lain, aktualisasi Pancasila hingga bagaimana pemahaman dan tantangannya.

Terlebih munculnya pandangan seolah-olah Pancasila telah ditinggalkan saat awal reformasi, dampak dari era orde baru yang menjadikan Pancasila sebagai alat menekan lawan politik. Sehingga muncullah pandangan tersebut.

"Sehingga secara tidak sadar, kita akhirnya memanen munculnya politik identitas, dan masih banyak lagi hal-hal yang tercerabut dari falsafah bangsa ini," kata Bedi Budiman.

Oleh karena itu, peringatan Hari Lahir Pancasila perlu kembali

dihidupkan. Setiap tahun Hari Lahir Pancasila perlu diperingati dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila.

"Karena jika tidak akhirnya Pancasila dilupakan, dan sudah pasti ideologi lain masuk. Akhirnya paham radikalisme subur,"

"Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi kegiatan seminar ini, dan aneka lomba (yang berkaitan dengan peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila). Apalagi Jabar menjadi paling dekat dengan DKI Jakarta, pusatnya dinamika politik," tambahnya.

Sementara itu dalam seminar, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Drs. Wahyu Mijaya membahas soal Pancasila dalam dunia pendidikan di Jawa Barat. Bagaimana pembelajaran di sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka belajar diharapkan membentuk profile pelajar Pancasila.

"Di sekolah, Pancasila tak sekedar teori. Tapi bagaimana mengimplementasikannya. Pancasila masuk dalam proses belajar mengajar," kata Wahyu Mijaya.

Sedangkan Sosiolog Asep Salahudin dalam seminar membahas terkait Pancasila ditengah gempuran paham radikalisme. Ia menjelaskan bagaimana paham radikalisme muncul dan subur di Indonesia.

Asep Salahudin pun membahas terkait definisi agama, membahas pula soal golongan abangan, santri dan priyayi sebuah penelitian Cliford Geertz.

Sementara itu, dalam sambutannya Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Jawa Barat Iman Tohidin ., berharap acara seminar dalam rangka Hari Lahir Pancasila bisa meningkatkan kecintaan masyarakat, dalam hal ini para peserta terhadap Pancasila. Termasuk mampu meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa ditengah berbagai tantangan.

"Kebanggaan bagi kami bisa melaksanakan dan memfasilitasi acara ini. Kami berharap kegiatan ini bisa meningkatkan pemahaman, kecintaan masyarakat khususnya anak muda terhadap Pancasila," harap Iman Tohidin. (rls)

## Kota Bekasi Peringkat 3 Indeks Kota Toleran

Category: Daerah, News, Pemerintahan

Juli 21, 2024



**JAKARTA, Prolite** — Setara Institute menggelar kembali acara ke enam kalinya berupa laporan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2022 yang terlaksana di Hotel Grand Sahid, Kuningan Jakarta.

Ini merupakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Setara Institute dalam mempromosikan praktik toleransi terbaik di Kota se-Indonesia, terdapat 94 Kota yang dinilai.

Dalam hal ini, Kota Bekasi mendapatkan undangan dalam acara

yang dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dengan didampingi oleh Kesbangpol Kota Bekasi.

Undangan tersebut juga dihadiri oleh 10 Kepala Daerah Kota yang mendapatkan penghargaan 10 besar dalam IKT 2022 ini.

Dr. Ismail Hasani, SH, MH selaku Ketua Badan Pengurus Setara Institute mengemukakan bahwa acara ini merupakan Publikasi ke 6 demi kemajuan toleransi.

Dengan harapan masyarakat mampu menulari seluruh yang ada di provinsi yang telah masuk dalam 10 besar penghargaan ini, harus memajukan toleransi di kota-kota lain yang bisa berdampak toleransi terbaik.



## Baca Juga: Rapat Sinergitas Pembangunan Penyusunan RKPD

"Saya ucapkan selamat kepada 10 besar yang meraih indeks kota toleran, dengan harapan bisa memperkenalkan budaya, toleransi yang bisa menjadi acuan untuk kota lain." Kata Ismail.

Usai sambutan, ia mengumumkan untuk hasil laporan Indeks Kota Toleran tahun 2022 diantaranya ;

Juara 10, Kota magelang dengan skor 5,670

Juara 9, Kota Kupang dengan skor 5,687

Juara 8, Kota Manado dengan skor 5,767

Juara 7, Kota Semarang dengan skor 5,783

Juara 6, Kota Sukabumi dengan skor 5,810

Juara 5, Kota Kediri dengan skor 5,850

Juara 4, Kota Surakarta dengan skor 5,883

Juara 3, Kota Bekasi dengan Skor 6,080

Juara 2, Kota salatiga dengan skor 6,417

Juara 1, Kota Singkawang dengan skor 6,583

Baca Juga : Sah, APBD Kota Bekasi 2023 Sebesar Rp5,9 Triliun

Kota Bekasi meraih penghargaan Indeks Kota Toleran tahun 2022 pada peringkat ketiga yang sebelumnya pada tahun lalu berada di peringkat ke 8 dari 94 Kota se Indonesia.

Plt. Wali Kota Bekasi langsung menerima penghargaan dari Setara Institute yang menyerahkan yakni Dr. Drs. Laode Ahmad Ap, selaku Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Bidang Ekonomi Pembangunan.

Tri Adhianto dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi tinggi atas peraihan penghargaan ini, Kota Bekasi dalam toleransinya tidak memandang suku agama ras dan agama apapun, semua menyatu di Kota Bekasi.

Bahkan ia menjelaskan di Kota Bekasi terdapat budaya di Kranggan yakni sistem kepercayaan, dimana satu tempat yang masih mempercayai sistem kepercayaan yakni di Jatisampurna Kranggan, ini adalah bentuk toleransi salah satunya, juga ia sebutkan ada satu wilayah bernama Kampung Bali yang didalamnya Ketua RT nya ialah beragama muslim tapi tidak mengurungkan niat untuk membentuk satu kawasan menjadi seperti di Bali.

"Semua bentuk penghargaan ini adalah kerjasama dari semua elemen yang ada di Kota Bekasi, penghargaan ini untuk Warga Kota Bekasi dengan bentuk Toleransi tinggi sesama manusia." Ujar Tri Adhianto.